



Pusat Studi Pentakosta Indonesia

RITORNERA - JURNAL TEOLOGI PENTAKOSTA INDONESIA

Vol. 1, No. 1, June 2021

Available at: pspindonesia.org

Mengimplementasikan Dwi Kewarganegaraan Kristendalam Era Pos-Sekulerisme

Gilrandi Aristya Dwi Pramonojati
gilrandy.adp@gmail.com

Abstract

This article examines the relationship of the Church to politics in post-secularism popularized by Jurgen Habermas. The research method used in this research is literature study. This research finds that, Post-secularism offered by Habermas provides space for the Church to translate the wealth contained in religion into a public message. In the view of post-secularism the Church has an important role to fill in the empty spaces that cannot be achieved by rationality. Habermas's thoughts on post-secularism also serve as a bridge to harmonize faith and rationality, as well as to explain dual citizenship as an unrelated Christian political view.

Keywords: Post-secular, Politics, Dwi Citizenship, Public

Abstrak

Artikel ini menelaah hubungan Gereja dengan politik dalam pos-sekulerisme yang dipopulerkan oleh Jurgen Habermas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa, Pos-sekulerisme yang ditawarkan oleh Habermas memberi ruang Gereja untuk menerjemahkan kekayaan yang terkandung dalam agama menjadi pesan publik. Dalam pandangan pos-sekulerisme Gereja mempunyai peran penting untuk mengisi ruang kosong yang tidak dapat dijangkau oleh rasionalitas. Pemikiran Habermas mengenai pos-sekulerisme juga menjadi jembatan untuk menyelaraskan iman dan rasional, sekaligus menerangkan kewarganegaraan ganda sebagai pandangan politik Kristen yang selama ini tidka dimengerti.

Kata kunci: Pos-sekuler, Politik, Dwi Kewarganegaraan, Publik

PENDAHULUAN

Sejak muncul dan berkembangnya sekulerisme, Gereja mengalami kesulitan untuk menerangkan sekaligus mengimplementasikan tentang dwi kewarganeraan. Dwi kewarganegaraan adalah dua kewarganegaraan yang dipercaya oleh Kristen, yaitu sebagai warga negara Kerajaan Allah dan warga negara yang terikat secara hukum pada suatu

negara. Bapak-bapak Gereja seperti St. Augustine, St. Thomas Aquinas, Martin Luhter, dan John Calvin menerangkan konsep dwi kewarganegaraan sebagai pandangan politik.¹ Dwi kewarganeraan juga menjadi etika politik yang diterangkan oleh Tuhan Yesus, dalam implementasi sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintahan di dunia.

Munculnya sekularisme, memisahkan hal-hal yang bersifat transenden atau supranatural dengan hal-hal yang bersifat natural dan rasional. Pemisahan ini memunculkan skeptisme terhadap segala sesuatu yang bersifat supranatural. Pandangan politik Kristen kemudian dipijakan hanya pada sisi kemanusiaan saja yang sesungguhnya mempunyai banyak kerapuhan. Teokrasi yang menjadi salah satu essensi dwi kewarganeraan Kristen jarang sekali dijadikan pijakan untuk membangun pandangan politik pada era sekularisme. Secara etimologi sekularisme berasal dari kata *saeculum* (bahasa latin), mempunyai arti dengan dua konotasi waktu dan ruang: waktu menunjukan kepada pengertian sekarang“ atau kini“, dan ruang menunjuk kepada pengertian „dunia“ atau „duniawi“².

Bangkitnya akal budi manusia dalam memberi penjelasan atas berbagai realitas kehidupan manusia. Dengan demikian, sekularisasi sekaligus melahirkan respon manusia yang kritis terhadap agama dan kekristenan. Orang mulai berorientasi pada hal-hal yang duniawi, yang ada di dalam dunia ini dari pada urusan supernatural di dalam gereja. Akibatnya, pandangan orang mengenai iman Kristen mulai berubah dan mengalami pergeseran. Masyarakat berpaling pada asas-asas ideologi lain sebagai sebuah tanggap sejarah atas perkembangan pemikiran baru di tengah arus modernitas. Salah satu penyebabnya adalah struktur pembentukan masyarakat Barat yang diawali dengan berbagai pra-anggapan yang sekular (non-keagamaan) di mana aktivitas beragama dipandang sebagai sebuah pilihan yang sangat pribadi bagi individu³.

Karel Dobbelaere berpendapat bahwa sekularisasi adalah suatu proses dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan-perubahan struktural, di mana suatu sistem keagamaan yang transenden dan mencakup segalanya disusutkan menjadi suatu sub-sistem dari masyarakat yang ada bersama subsistem-subsistem lainnya; proses ini membuat klaimklaim tentang pencakupan segalanya itu kehilangan relevansinya. Dengan demikian, lembaga agama termarginalisasikan dan terprivatisasi⁴.

¹ See Brian Tierney, *The Idea of Natural Rights: Studies in Natural Rights, Natural Law, and Church Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

² Sonny Eli Zaluchu, “Mengkritisi Teologi Sekularisasi,” *Kurios* 4, no. 1 (2018): 26–38.

³ Tony Lane, *Runtut Pijar Sejarah Pemikiran Kristiani* (Jakarta: Gunung Mulia, 2005).

⁴ Karel Dobbelaere, *The Secularization of Society? Some Methodological Suggestions,* in *Secularization and Fundamentalism Reconsidered: Religion and the Political Order*, Ed (New York: Paragon House, 2008).

Dilepaskannya dimensi supranatural membuat pandangan politik Kristen menjadi sangat sempit dan klise. Pandangan politik hanya sebatas moral yang meskipun dalam pelaksanaannya dirasa cukup sulit untuk diterima dan dilakukan secara rasional. Disisi lain kelompok Gereja yang menjaga tradisi melihat politik sebagai suatu hal yang sangat duniawi, yang sebaiknya tidak bersentuhan terlalu dalam. Pesan-pesan profetis, prinsip-prinsip dan etika Kristen yang seharusnya dapat menjadi sumber pandangan dan sikap politik tidak termanifestasikan di ruang publik. Pemisahan antara supranatural dan rasional juga sangat mempengaruhi misi Gereja dalam menghadapi dinamika sosial politik yang sedang terjadi. Dalam praktiknya Gereja justru sangat kompromis dengan para politisi. Kepentingan Gereja dalam politik hanya sebatas mengamankan dukungan politis dari pemerintahan agar mengamankan kehidupan Gereja⁵

Pandangan terhadap sekulerisme saat ini mendapat perlawanan yang sangat kuat, dan bahkan telah menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya. Salah satu tokoh yang menentang sekulerisme adalah Jurgen Habermas. Sebagai kritik terhadap sekulerisme, Habermas mengenalkan konsep tentang pos-sekuler. Pos-sekuler ini percaya bahwa agama tidak akan punah meskipun dianggap akan punah oleh para pemikir sekulerisme. Habermas menunjukkan bahwa agama saat ini mempunyai peran penting yang tidak dapat dijawab oleh sekulerisme. Bagi Habermas, sekulerisme gagal melegitimasi moral meskipun moral sangat dijunjung tinggi.⁶

Keruntuhan kedigdayaan sekulerisme yang selama ini dianggap-agung dipercaya muncul saat peristiwa penyerangan gedung kembar WTC pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut dipercaya menjadi momentum bangkit dan munculnya kembali agama diruang publik. Agama dipercaya mampu menggerakkan massa dan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan atau gerakan yang sangat berpengaruh dalam politik.

Habermas juga menyebutkan bahwa kebangkitan gerakan Pentakosta menjadi salah satu fenomena yang memperkuat tesisnya tentang pos sekulerisme⁷. Munculnya dan berkembangnya gerakan Pentakosta menunjukkan agama tidak lagi hanya dibicarakan diruang-ruang privat saja. Habermas juga menyebut kebangkitan kebangkitan Buddhis pasca-sosialis, prakarsa berbasis iman, kekerasan komunal, dan “musim semi Arab” untuk memperkuat argumennya bahwa agama telah menjadi perhatian publik.

⁵ E Budi Hardiman, *Demokrasi Dan Sentimentalistas : Dari Bangsa Setan-Setan, Radikalime Agama, Sampai Post-Sekulerisme* (Yogyakarta: Kanisius, n.d.).

⁶ A Sunarko, *Dialog Teologis Dengan Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Lamalera, 2010).

⁷ibid

Di Indonesia sendiri pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi bukti bagaimana agama mempunyai kekuatan dan pengaruh yang besar secara sosial maupun politik. Penistaan agama yang dialamatkan kepada Ahok mendorong kemenangan politik bagi kompetitornya politiknya saat itu. Dampak politik DKI Jakarta tersebut bahkan masih terus membekas sampai hari ini. Disisi lain, keberanian Ahok untuk menerangkan dan menyatakan iman di depan publik juga menggerakkan dan membangkitkan semangat baru Gereja dalam politik.

Fenomena politik yang belum lama ini terjadi di Amerika Serikat, menunjukkan betapa krusialnya peran agama dalam politik. Beberapa kelompok Gereja berani keluar untuk berdoa dan menyuarakan suara profetik di depan publik. Menurut Habermas, agama sangat berpotensi untuk mengisi kekosongan atau kegagalan sekulerisme dalam menggalang solidaritas. Habermas percaya nilai-nilai religius menjadi kekuatan utama agama dalam menggalang solidaritas. Masyarakat sekuler yang sangat individualis sangat kesulitan untuk menggalang solidaritas⁸. Pandangan post-sekuler Habermas ini dipercaya memberi ruang bagi agama untuk membangun konstruksi politiknya. Dalam hal ini Gereja mempunyai kesempatan yang sangat luas dalam memaknai kembali politik. Saat ini politik bukan hanya sekedar perayaan, melainkan telah membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, *library researchs*, dengan data primer karya Jurgen Habermas *Between Naturalism and Religion (2008)*. Dan esainya berjudul *The Retional Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology (2011)*. Pendekatan dan sudut pandang yang digunakan dalam studi adalah filsafat politik

PEMBAHASAN

Post-Sekuler

Secara etimologi, kata sekulerisme berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang mempunyai arti zaman. Dalam sejarah Gereja Katholik Roma kata sekulerisme inilah pertama kali muncul. Kata sekulersasi ditujukan bagi seorang rahib yang meninggalkan biara dan kembali kemasyarakat. Dengan kata lain, sekulerisasi dapat diartikan sebagai “proses penduniaan”. Munculnya perjanjian Westphila (1648) dianggap sebagai momentum sekulerisme berkembang sangat pesat. Perjanjian Westphila merupakan perjanjian untuk

⁸ Jurgen Habermas, *Basis Prapolitik Sebuah Negara Hukum Yang Demokratis* (Yogyakarta: Lamalera, n.d.).

mengakhiri konflik antara Gereja Katolik dan Kristen. Dalam perjanjian Westphalia aset Gereja diambil oleh negara dan digunakan untuk kepentingan publik.

Dalam perkembangan, sekularisasi sangat berkaitan dengan dengan cara pandang dan gaya hidup. Menurut Ulfing, Sekulerisme mengungkap hilangnya pandangan dan sistem religius yang eskatologis dan diganti dengan pandangan rasional yang sangat praktis⁹. Dampak dari pandangan ini adalah manusia menjadi tuan atas dirinya, alam, dan sejarahnya. Dalam politik, pandangan sekulerisme melahirkan untuk negara sekuler dimana agama dan negara dipisah. Agama dimasukkan dalam ruang-ruang privat bahkan dianggap sudah punah.

Bertahannya agama dalam masyarakat modern menarik perhatian Habermas untuk menjawab penilaian terhadap agama selama masa sekulerisme. Budi Hardiman, salah satu pembaca dan peneliti karya Habermas menyatakan agama sesungguhnya tidak dapat dibatasi pada ruang privat. Sebaliknya agama harus lebih proaktif di ruang publik dengan menggunakan dokumen-dokumen dan tradisinya untuk mengintuisi moral¹⁰.

Merujuk pada dorongan kepada agama untuk lebih proaktif di ruang publik, Kekristenan mempunyai dokumen-dokumen dan tradisi yang dapat mengintuisi moral. Kekristenan memiliki sejarah bagaimana diajar untuk menaati pemerintah dan hidup dalam sebuah sistem politik, meskipun seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik. Dasar ketaatan terhadap pemerintahan ini setidaknya menjadi batas aman Gereja dalam membangun pandangan politiknya. Menguatkan pandangan tersebut Sunarko menyebutkan, *“Agama-agama itu merupakan pandangan dunia, bukan sekadar sistem nilai. Karena itu dalam agama ditemukan isi kognitif dan kekuatan motivasi yang tidak ada dalam pandangan dunia yang profan”*¹¹

Habermas menyebutkan tiga alasan mengapa agama dapat kembali dan mempunyai pengaruh yang kuat di ruang publik¹². *Pertama*, naturalisme dan Bioteknologi yang terus berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan naturalisme dan Bioteknologi mendorong instrumentalisasi terhadap paham tentang manusia. Meski begitu Habermas tetap mengawatirkan naturalisme yang sansitisik dapat meredusir segala sesuatu yang dapat diamati dan dimengerti oleh panca indra.

Kedua, gelombang reaksi terhadap gelombang modernisasi barat yang terjadi di seluruh belahan dunia. Modernisasi barat seringkali dianggap sebagai pihak-pihak yang

⁹ Ulfing Alexander, *Lexicon Der Philosophischen Begriffe* (Wiesbaden: Fourier Verlag, n.d.).

¹⁰ Hardiman, *Demokrasi Dan Sentimentalistas : Dari Bangsa Setan-Setan, Radikalime Agama, Sampai Post-Sekulerisme*.

¹¹ Sunarko, *Dialog Teologis Dengan Jurgen Habermas*.

¹² ibid

menjunjung tinggi sekulerisme. *Ketiga* adalah semakin menipisnya solidaritas masyarakat akibat modernisasi dan sekularisasi. Masyarakat modern tidak dapat menyelesaikan individualisme, disintegrasi sosial, benturan peradaban, dan penggunaan teknologi yang menghancurkan peradaban umat manusia¹³ Masyarakat hidup dalam monade-monade yang terisolasi satu dengan yang lain. Hak pribadi digunakan untuk menghancurkan satu sama lain.

Peran Agama dalam Post-Sekuler

Menurut Habermas, agama dapat memainkan peran emansipatoris dalam post-sekuler. Emansipatoris mengisi ruang kosong yang tidak dapat dijangkau oleh sekulerisme yang cenderung lebih individualis. Agama dapat menggerakkan kekuatan massa melalui perannya emansipatoris dalam masyarakat. Persoalan-persoalan moral publik seperti eutanasia, aborsi, dan kloning manusia terbukti tidak mampu dijawab oleh sekulerisme. Moral sekuler tidak cukup kuat untuk membendung rasa ingin mengakhiri hidup oleh seseorang yang menderita akibat sebuah penyakit. Dalam segi politik, moral sekuler juga terbukti gagal melawan korupsi. Keamanan dan keuntungan pribadi membuat orang enggan melawan korupsi. Banyak orang bahkan rela melibatkan diri dalam korupsi meskipun dalam pidato atau kotbah selalu didengungkan ajakan melawan korupsi¹⁴.

Secara filosofi, masyarakat sekuler tidak mengerti mengapa manusia harus tetap menaati nilai-nilai dan norma jika nyawa menjadi ancamannya. Hal ini mengakibatkan munculnya apatis terhadap politik yang dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan jika terlalu aktif. Politik bahkan perlahan dihindari dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Dalam sekulerisme muncul pandangan netralitas dari agama-agama (dan Gereja) terhadap politik. Netralitas ini yang membuat Gereja dianggap terpenjara dalam ruang-ruang privat.

Habermas mendefinisikan agama diruang publik sebagai jembatan yang menghubungkan rasionalitas dan iman, yang termanifestasikan dalam *commonsence* yang rasional dan demokratis. Dalam hal ini Habermas sesungguhnya memberi ruang pada agama untuk menerjemahkan dirinya dalam pada masyarakat umum. Dengan demikian iman bersifat terbuka terhadap setiap bentuk analisa kritis dan rasional. *Commonsense* tidak dapat lagi dipijakan tunggal pada rasionalisme tanpa menempatkan agama disana. Kediaan

¹³ Gusti A Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Post-Sekuler Menurut Jurgen Habermas*. (Yogyakarta: Kanisius, 2015).

¹⁴ Otto Gusti Mandung, *Toleransi Dan Diskursus Post-Sekulerisme* (Flores: Ledalero, n.d.).

untuk saling membuka diri ini menjadi pilar penting agama dan masyarakat sekuler untuk membangun padangan dan sikap politik yang lebih bertanggung jawab.

Habermas juga menempatkan agama dalam narasi “nalar publik”, yang ia kenalkan dalam artikel *Glaube und Wissen* (2001). Nalar publik menggambarkan sumber daya nalar terlepas dari logika penelitian “*Science*” sebagai ilmu pengetahuan empiris ketat. Nalar publik yang dinarasikan Habermas ini adalah antitesis dari pemikiran seientisme Max Weber. Dalam Narasi publik inilah agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang irrasional yang tidak memiliki kebenaran teoritis dan ketepatan praktis¹⁵. Dengan adanya nalar publik ini agam tentu mempunyai keleluasaan yang sangat besar dalam mengartikulasikan pandangan politiknya baik yang bersifat moril maupun yang bersifat transenden. Secara tidak langsung nalar publik ini menyatakan bahwa politik adalah hak dan sekaligus kewajiban yang harus diambil oleh agama.

Hadirnya peran penting agama dalam politik dan masyarakat membuat post-sekulerisme tidak hanya memiliki dimensi empiris melainkan juga normatif. Ketika agama menerjemahkan bahasanya dalam nalar publik, maka secara internal agama membutuhkan struktur baru yang membuka proses pluralisme agama secara internal. Keterbukaan ini bagi Habermas berbeda dengan pluralisme radikal yang menutup semua ruang dialog. Dialog justru menjadu jalan atau media interaksi agama dan pengetahuan.

Meski agama dianggap sangat penting dalam post-sekuler, Habermas tetap menolak totalitarian agama dan fanatisme sempit. Penolakan terhadap totaritarian agama inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pemikiran Habermas tentang post-sekuler. Agama ditempatkan dalam konteks demokrasi dimana ruang-ruang interaksi dan dialog menjadi bagian penting didalamnya. Pluralitas masih menjadi perhatian penting bagi Habermas dalam rangka mengajak kembali agama ke ruang publik. Akan tetapi Habermas menolak pluralisme post-modern yang berusaha mengeliminasi identitas agama. Habermas memberikan tiga kriteria agar agama dapat berperan dengan baik di ruang publik¹⁶. *Pertama* agama harus menentukan epistemis yang dapat berinteraksi dengan kenyataan plural. Agama diharapkan dapat menunjukkan pandangan yang saling berkaitan dengan ajaran agama lain, akan tetapi tidak serta merta mengobarkan klaim terhadap keyakinannya sendiri.

Kedua agama harus menemukan epistemis yang dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Agama harus dapat menerjemahkan hal-hal bersifat dogmatis menjadi ilmu

¹⁵ibid

¹⁶ Philip S Gorski, *Post-Secular in Question*, *Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society* (New York: New Yor University Press, n.d.).

atau pengetahuan yang dapat ditangkap oleh semua kalangan masyarakat. *Ketiga* agama harus menyadari bahwa politik hanya menjustifikasi nalar-nalar maupun argumen-argumen sekuler. Dalam hal ini agama diharapkan dapat membangun pandangan yang menyeluruh sehingga sehingga mampu mengintegrasikan nilai-nilai norma umum dengan nilai-nilai dan norma agama.

Mengimplementasikan Dwi Kewarganegaraan Kristen dalam Post-Sekuler

Post-Sekuler memberi ruang yang sangat luas bagi Gereja untuk membangun padangan politik dan moralitasnya pada ruang-ruang publik. Post-sekulerisme yang bangun Habermas memberi ruang interaksi antara ilmu pengetahuan yang rasional dengan dunia supranatural yang dimiliki Gereja. Selama ini Gereja sangat sulit menunjukkan sikap politik maupun moralitasnya yang sejati karena Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari keterikatan secara spiritual dengan Allah yang transenden. Sekulerisme menutup mata bahkan selalu mengeliminasi dimensi supranatural dimana sumber-sumber Kekristenan berasal.

Sebagai bentuk praktis, Gereja biasanya mengajarkan dan berpegang teguh pada politik netralitas. Politik netralitas yang dianggap sebagai bentuk keadilan seringkali justru berusaha menghindar dari urusan politik dan sosial yang kompleks. Melalui jembatan nalar publik, Gereja saat ini dapat menerangkan hubungan antara relasi dengan dimensi supranatural dengan dunia nyata sebagai bentuk sikap politik maupun dasar dari norma dan etika Kristen. Martin Luther pernah memberikan suatu padangan politik dan etika sosial yang menggambarkan interaksi antara realitas supranatural dan rasional, seperti yang digambarkan oleh Habermas dalam nalar publik. Pada masa reformasi Gereja, Martin Luther menerangkan tentang dwi kewarganegaraan sebagai pandangan politik dan etika moral Kristen. Dwi kewarganegaraan adalah dua kewarganegaraan yang dimiliki umat Kristen yaitu sebagai warga negara Kerajaan Surga, sekaligus warga negara yang terikat secara hukum suatu negara. Bagi Luther, Kekristenan hanya terikat pada satu hal saja yaitu iman. Iman merupakan bagian utama karena spiritualitas manusia tidak akan pernah menjadi sempurna tanpa kasih karunia Allah. Iman yang menjadi satu-satunya jalan penghubung kerohanian inilah yang membuat orang Kristen sejatinya sangat terikat dengan Allah¹⁷.

Iman dan kasih karunia ini menempatkan Allah menjadi pusat dari alam semesta, termasuk manusia. Allah bertahta, dia mempunyai kekuasaan dan otoritas yang lebih tinggi bagi manusia. Berbeda dengan padangan sekuler yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Iman dan kasih karunia tidak serta menjadikan Kristen sebagai pribadi

¹⁷ McGrath E Alister, *Sejarah Pemikiran Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung mulia, n.d.).

atau kelompok yang superior dibandingkan dengan yang lain dalam realitas umum. Meski Martin Luther sangat menekan iman dan kasih karunia, dia juga mendorong pentingnya aspek hidup sebagai warga negara dunia. Martin Luther mengutip ayat Paulus tentang dwi kewarganegaraan dalam kitab Roma Roma 13:1¹⁸.

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.

Kepatuhan dan keterikatan umat Kristen terhadap Tuhan menjadi kekuatan legitimasi melakukan tindakan moral. Kepatuhan dan keterikatan secara supranatural ini tentu mampu mendorong seseorang mampu melewati batasan diri yang dimiliki. Bagi masyarakat umum diluar Kristen, dwi kewarganegaraan memberi batas aman untuk berdialog dengan Kristen. Dwi kewarganegaraan yang diikuti dengan kepatuhan terhadap pemerintah negara menghindarkan Kekristenan dari keinginan untuk memberontak. Meski tidak selaras dengan pemerintahan yang berkuasa, Kekristenan memberikan komitmen untuk tidak memilih menjadi pemberontak. Inilah yang juga diharapkan oleh Habermas ketika mengundang agama kembali masuk keruang publik. Habermas memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap otoriterisme agama yang dapat saja muncul apabila agama kembali keruang publik.

Otoriterisme agama tentu lebih buruk dari sistem demokratis sekuler yang mencoba mencabut identitas agama dalam ruang-ruang publik. Demokratis sekuler setidaknya memberi ruang untuk berinteraksi bagi masyarakat, meskipun hal-hal yang bersifat supranatural tidak begitu diperhatikan.

Pandangan post-sekulerisme menjadi otokritik bagi kelompok Gereja yang justru yang mulai melepaskan dimensi spritual dan skeptis terhadap kemungkinan untuk menerangkan hal-hal yang bersifat supranatural dalam politik yang sangat rasional. Gereja harus menghargai dan bahkan membantu menerjemahkan pesan-pesan profetik yang dinyatakan berbagai kelompok dan aliran Gereja. Tidak semua Gereja mempunyai sumber daya yang memadai untuk menerangkan maksud profetik kedalam bahasa politik yang lebih umum, seperti yang disarankan oleh Habermas. Beberapa kelompok Gereja benar-benar mencoba bersuara atas politik karena mendapat dorongan spiritual. Dalam hal ini Gereja

¹⁸ Philip Wogaman, *Christian Ethics: A Historical Introduction* (Westminster: John Knox Press, 1997).

harus dilihat sebagai tubuh Kristus, sehingga keberagaman cara pandang dan suara profetis yang disuarakan dapat diterjemahkan dan diterima publik yang plural¹⁹.

Memang bukan perkara yang mudah untuk mengintegrasikan pesan profetik yang sangat beragam dari berbagai aliran Gereja. Setidaknya proses saling mendengar mendengar dan saling berinteraksi antar Gereja dan menjadi proses untuk menguji untuk menemukan pesan spiritual yang lebih tajam dan bertanggung jawab. Proses ini tentu memberi ruang bagi seluruh aliran dan kelompok Gereja untuk tampil bersama memainkan peran penting diruang publik. Gereja tentu tidak dapat lagi berfikir sektarian dalam menjawab tantangan politik yang sedang dihadapi. Hal ini juga bukan berarti memaksa atau menyatukan seluruh aliran Gereja dalam satu partai atau bahkan satu negara tertentu. Proses penyelarasan secara rohani sebagai bentuk bagian dari warga kerajaan surga ini dapat membentuk gerakan atau dorongan politik tanpa menghilangkan keberagaman. Hal ini kembali menegaskan bahwa Gereja memiliki jalan untuk menghindarkan diri dari otoritarianisme agama.

Secara praktis, implementasi politik Kristen tidak hanya fokus pada gerakan politik praktis seperti membangun organisasi politik, melakukan aksi politik dan dll. Implementasi politik dalam pandangan dwi kewarganeraan Kristen juga melihat doa, firman, pengakabaran Injil, dan pemuritan sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari politik praktis. Baik yang terjun langsung secara praktis maupun yang hanya bergerak melalui doa dan firman, semua bersumber pada dorongan yang sama yaitu dari iman terhadap Tuhan.

Dengan ini para politikus dan kelompok politik Kristen tidak hanya sekedar memanfaatkan Gereja untuk kepentingan politis mereka. Mereka harus mendengar suara profetik Gereja sebagai bagian dari iman yang mendorong terjun kedalam politik praktis. Disisi lain Gereja harus berani menyuarakan suara profetis dan merilis jemaat yang terpanggil menjadi bagian yang diutus dalam politik.

KESIMPULAN

Pandangan politik Habermas tentang post-sekuler memberi ruang yang sangat besar Gereja untuk membangun kembali pandangan politik dan perannya di publik. Dwi kewarganegaraan Kristen dapat diimplementasikan secara utuh di era pos-sekuler. Dwi kewarganegaraan Gereja yang bersumber dari hal-hal yang bersifat spiritual dapat digali kembali sebagai kekuatan Gereja dalam berinteraksi dengan publik yang sangat plural. Dengan terbuka ruang interaksi dalam post-sekuler, Gereja diharapkan dapat membangun

¹⁹ Ignas Kleden, "Masyarakat Post-Secular: Tuntutan Aktualitas Relasi Akal Dan Iman," (Ceramah dalam rangka Studium Generale Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 16 Agustus 2010).

kembali pandangan politik dengan merangkul semua aliran dan kelompok Gereja untuk menyatakan suara profetis melalui dwi kewarganegaraan Kristen.

Dalam post-sekuler Gereja juga mempunyai ruang untuk berinteraksi dengan berbagai kepercayaan tanpa perlu untuk menghilangkan iman dan hal-hal spiritual yang tidak dapat diterangkan dan diterima oleh semua orang. Mengingat keterbatasan dalam studi ini, penulis berharap ada studi lanjut mengenai topik ini. Keterbatasan penulis membuat topik ini perlu dibatasi dalam pandangan awal tentang gambaran awal tentang proses implementasi pandangan politik Kristen yang lebih menyeluruh. Masih ada banyak topik yang perlu ditelaah terkait hubungan Gereja dan post-sekulerisme.

REFERENSI

- Alexander, Ulfig. *Lexicon Der Philosophischen Begriffe*. Wiesbaden: Fourier Verlag, n.d.
- Alister, McGrath E. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung mulia, n.d.
- Dobbelaere, Karel. *The Secularization of Society? Some Methodological Suggestions,* in *Secularization and Fundamentalism Reconsidered: Religion and the Political Order*, Ed. New York: Paragon House, 2008.
- Gorski, Philip S. *Post-Secular in Question*, *Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society*. New York: New York University Press, n.d.
- Habermas, Jürgen. *Basis Prapolitik Sebuah Negara Hukum Yang Demokratis*. Yogyakarta: Lamalera, n.d.
- Hardiman, E Budi. *Demokrasi Dan Sentimentalistas : Dari Bangsa Setan-Setan, Radikalisme Agama, Sampai Post-Sekulerisme*. Yogyakarta: Kanisius, n.d.
- Kleden, Ignas. "Masyarakat Post-Secular: Tuntutan Aktualitas Relasi Akal Dan Iman." Vol. 3. Yogyakarta, 2010.
- Lane, Tony. *Runtut Pijar Sejarah Pemikiran Kristiani*. Jakarta: Gunung Mulia, 2005.
- Mandung, Otto Gusti. *Toleransi Dan Diskursus Post-Sekulerisme*. Flores: Ledalero, n.d.
- Menoh, Gusti A. *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Post-Sekuler Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Sunarko, A. *Dialog Teologis Dengan Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Lamalera, 2010.
- Tierney, See Brian. *The Idea of Natural Rights: Studies in Natural Rights, Natural Law, and Church Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Wogaman, Philip. *Christian Ethics: A Historical Introduction*. Westminster: John Knox Press, 1997.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Mengkritisi Teologi Sekularisasi." *Kurios* 4, no. 1 (2018): 26–38.